

KETAHANAN PANGAN PADA ERA GLOBALISASI DAN OTONOMISASI

Sri Widodo

Universitas Gadjah Mada dan Universitas Janabadra Yogyakarta

ABSTRACT

Food security deals with food availability, accessibility and stability. Food availability can be from domestic production and import. Although the production of cereals in developing countries almost equal to the production in developed countries, the much greater population of almost 79 % of the world population, the self sufficiency rate of cereals in developing countries is only 91% and to be net importer, while the self sufficiency rate of the developed countries, are more than 100 % (108 %). There are some exception for several developing countries to be big rice exporters such like Thailand, Vietnam, India, China and Pakistan.

Cereal staple foods in developing countries is dominated by rice especially in East and South Asia, includes Indonesia. International rice market is characterized with oligopolistic since only six big exporting countries supplying the international rice market.

After experiencing rice self sufficiency in 1984 – 1994 Indonesia have been net rice importer again, even in 1998 21% of marketed rice in the world market were imported by Indonesia. There should be a policy to increase production to a certain rate of rice self sufficiency that will not influence the world rice market equilibrium.

The food accessibility depend closely on the wider economic condition such as income distribution, poverty and unemployment, Government intervention is needed to reduce instability including to protect from the international market instability by flexible tariff. Stabilizing the seasonal price fluctuation by floor price and ceiling price policy combined with buffer-stock policy had been successful. However, there should be a modified policy toward more liberalized without import monopoly.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan, globalisasi dan otonomisasi adalah topik yang merupakan isu yang hangat dan telah banyak ditulis, diseminarkan, didiskusikan dsb. Namun demikian masalah ini tetap menarik dan tidak mudah disimpulkan apalagi direkomendasikan sebagai kebijakan. Oleh karena itu topik ini tetap relevan agar dapat ditelaah dari berbagai aspek dan berbagai kepentingan.

Apakah yang dimaksud dengan ketahanan pangan (*food security*) telah banyak ditulis, tetapi baik juga dikemukakan disini kembali sekedar mengingatkan pada pengertian ketahanan pangan tersebut. FAO (1996) berkepentingan pada ketahanan pangan dunia, bahwa setiap orang mempunyai hak azasi untuk bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi serta memperoleh kehidupan yang bermartabat sehingga aksesnya terhadap pangan yang diinginkan sepanjang waktu dijamin. Masalah ketahanan pangan ini di Indonesia mulai mendapat perhatian lebih besar pada saat krisis ekonomi, sebagai salah satu komponen jaring pengaman sosial, yang mencakup juga penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah dan pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan (Soetrisno dan Ismoyowati, 1999).

Ketahanan pangan rumahtangga menyangkut terpenuhi pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai serta merata aman dan terjangkau. Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan (*availability*), stabilitas (*stability*), dan keterjangkauan (*accessibility*). Bagaimana ketahanan pangan ini dalam hubungannya dengan globalisasi dan otonomisasi adalah masalah yang tidak mudah karena adanya gejala berbagai penyimpangan dan pembelokan akan kenyataannya.

Globalisasi dalam arti liberalisasi perdagangan internasional menjanjikan berbagai dampak positif dalam mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi dunia, meningkatkan efisiensi ekonomi berdasar keunggulan komperatif, meredam variabilitas pasokan pangan, dan produksi global lebih ekonomis. Namun kenyataan tidak selalu seperti yang diharapkan karena struktur pasar dunia yang tidak kompetitif dan proteksi justru dilakukan oleh negara yang kuat. Hal demikian berpengaruh besar pada usaha ketahanan pangan jangka panjang bagi negara-negara berkembang.

Otonomisasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia juga memberikan harapan adanya dampak positif dari desentralisasi kebijakan sehingga dapat menghasilkan proses kehidupan ekonomi yang lebih efisien karena adanya keunggulan komperatif lokal baik dalam produksi maupun diversifikasi konsumsi pangan. Bagaimanapun juga otonomi daerah seharusnya tidak mengabaikan kepentingan daerah lain dan kepentingan nasional.

KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari impor. Ketersediaan pangan perkapita ditentukan juga oleh jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2000 diperkirakan 6265 juta dengan pertumbuhan 1,7 % antara 1990-2000 dan pada tahun 2010 diperkirakan menjadi 7208,6 juta dengan pertumbuhan 1,4 % antara 2000-2010 (FAO, 1995). Dari sejumlah penduduk tersebut 4946,9 juta atau 78,96 % di negara-negara yang sedang berkembang pada tahun 2000 dengan pertumbuhan 2 % antara 1990-2000. Pada tahun 2010 penduduk negara-negara berkembang naik menjadi 5835,2 juta dan proporsinya naik menjadi 80,95 % karena pertumbuhannya yang lebih tinggi 1,7 % (tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Dunia dan Pertumbuhannya

	1990		2000		2010	
	(juta)	(%)	(juta)	(%)	(juta)	(%)
Dunia	5296,9	100	6265,0	100	7208,6	100
Negara berkembang	4045,9	76,38	4946,9	78,96	5835,2	80,95
Asia Timur	1624,4	30,67	1879,5	30,0	2061,2	28,61
Asia Selatan	1127,7	21,29	1398,0	22,31	1667,6	25,13
Indonesia	184,3	3,48	218,7	3,49	246,7	3,42
Negara Maju	1248,9	23,56	1314,7	20,98	1369,7	19,0
Pertumbuhan (% pertahun)						
	1980-1990		1990-2000		2000-2010	
Dunia	1,8		1,7		1,4	
Negara Berkembang	2,1		2,0		1,7	
Asia Timur	1,6		1,5		0,9	
Asia Selatan	2,4		2,2		2,8	
Indonesia	2,0		1,7		1,2	
Negara Maju	0,7		0,5		0,4	

Sumber : FAO, 1995

Penduduk Asia Timur dan Asia Selatan 1879,5 juta (30%) dan 1398 juta (22,31%) pada tahun 2000 dengan pertumbuhan 1,5 % dan 2,2 %. Jadi Asia Timur dan Asia Selatan berpenduduk 3277,5 juta atau 52,31 % dari penduduk dunia.

Penduduk Indonesia dari perkiraan FAO tahun 2000 berpenduduk 218,7 juta atau 3,49 % dari penduduk dunia dengan tingkat pertumbuhan 1,7 % pertahun tahun 1990-2000.

Proyeksi tahun 2010 proporsi penduduk negara-negara berkembang dan negara-negara di Asia akan meningkat meskipun untuk Asia Timur termasuk Indonesia menurun karena tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk dunia.

Ketersediaan pangan dunia pada tahun 1988/90 sebesar 2697 kalori per kapita per hari. Indonesia sedikit lebih rendah yaitu 2605 tetapi lebih tinggi dari rata-rata negara berkembang (2474 kalori), Asia Timur (2597 kalori) dan Asia Selatan (2215 kalori) (tabel 2). Dan nampaknya ketersediaan pangan di Indonesia ini makin meningkat sampai 1996 menjadi 3193 kalori, lalu turun waktu krisis ekonomi 1997 menjadi 2865 kalori dan kemudian naik lagi menjadi 2991 kalori tahun 1998 (tabel 3). Dari angka-angka ini dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan telah mencukupi kebutuhan rata-rata penduduk Indonesia kalau dibandingkan dengan angka yang dianjurkan pada Pelita VI sebesar 2150 kalori per kapita per hari.

Tabel 3. Ketersediaan Kalori per Kapita per Hari

Kelompok Bahan Pangan	1994		1996		1997		1998	
	Kalori	%	Kalori	%	Kalori	%	Kalori	%
Padi-padian	1876	65,9	2084	63,7	1893	66,1	1914	64,0
Minyak dan Lemak	246	8,5	345	10,8	220	7,7	306	10,2
Buah-biji berminyak	229	8,0	233	7,3	208	7,3	217	7,3
Makanan berpati	187	6,5	217	6,8	201	7,0	200	6,7
Gula	156	5,4	172	5,4	170	5,9	174	5,8
Total	2879	100	3193	100	2865	100	2991	100

BPS, Statistik Indonesia 1998.

Ketersediaan protein dan lemak juga telah mencukupi kebutuhan dibandingkan angka yang dianjurkan pada Pelita VI sebesar 46,2 gram per kapita per hari untuk protein dan lemak minimum 10 % dari energi (BPS, 1998) Protein yang tersedia 68,83 gram tahun 1998 dan lemak 54,78 gram. Secara umum tahun 1997 terjadi penurunan dan 1998 mulai merambat naik (tabel 4).

Dari ketersediaan pangan ini baik sebagai sumber kalori maupun protein, padi-padian merupakan sumber utama, lebih dari 60 % sumber kalori dan hampir 60 % sumber protein. Bahkan sebagai sumber lemakpun padi mempunyai kontribusi yang cukup berarti (12 %). Dengan demikian tidak berlebihan kiranya kalau padi/beras selalu menjadi pusat perhatian kalau membicarakan masalah pangan di Indonesia.

PRODUKSI DAN PERDAGANGAN

Produksi sereal dunia pada tahun 1988/90 antara negara berkembang dan negara maju hampir sama besarnya yaitu 847.407 ribu ton atau 49,92 % di negara berkembang dan 850.164 ribu ton atau 50,08 % di negara maju (tabel 5). Dengan penduduk yang besar pada negara berkembang (76 %) maka negara berkembang harus mengimpor dan mempunyai tingkat swasembada kurang dari 100% (91 %) sedang negara maju mengekspor kelebihan produksi sereal dengan tingkat swasembada lebih dari 100 % (108%) (tabel 5).

Tabel 4. Ketersediaan Protein dan Lemak (gram per kapita per hari)

Bahan Makanan	Protein		Lemak	
	1997	1998	1997	1998
Padian-padian	38,56 (58,5)	39,85 (57,9)	6,01 (12,5)	6,68 (12,2)
Daging, telur, susu, ikan	10,96 (16,6)	11,15 (16,2)	5,18 (9,18)	5,57 (10,2)
Buah-biji berminyak	12,49 (18,9)	13,65 (19,8)	15,51 (29,3)	16,8 (29,4)
Minyak & Lemak	0,01 (+)	0,01 (+)	24,44 (46,2)	25,32 (46,32)
Total	65,97 (100)	68,83 (100)	52,88 (100)	54,98 (100)

Sumber BPS, Statistik Indonesia 1998

Keterangan : angka-angka dalam kurung menunjukkan persentase (+) kurang dari 0,05%.

Asia secara keseluruhan dan Indonesia mempunyai neraca perdagangan serealial yang negatif dengan tingkat swasembada kurang dari 100%.

Yang dimaksud dengan serealial disini meliputi gandum, beras, jagung, barley, millet dan sorghum. Dari enam macam, serealial ini yang besar peranannya adalah gandum, beras dan jagung dalam jumlah produksi dunia. Dari Asia yang paling penting sebagai makanan pokok adalah beras. 95% beras dunia diproduksi di negara-negara berkembang dan 88% di produksi di Asia Timur dan Asia Selatan (tabel 6). Namun demikian konsumen terbesar beras ada di Asia termasuk Indonesia, sehingga secara keseluruhan Asia merupakan *net rice importer*, meskipun beberapa negara Asia merupakan negara pengekspor beras seperti Thailand, Vietnam, Cina, Pakistan dsb. Demikian pula Indonesia, setelah swasembada sepuluh tahun sejak 1984, Indonesia mengimpor lagi dalam jumlah yang besar.

Sifat pasar beras dunia sudah dikemukakan beberapa penulis bahwa pasar beras dunia bersifat tipis (*thin market*) atau *residual market* karena hanya sebagian kecil dari produksi, kelebihan dari kebutuhan konsumsi domestic yang dipasarkan (Widodo, 1992; Sawit, 2001; Masyhuri, 2001), serta bersifat oligopoli karena pengekspor besar hanya enam negara yaitu Thailand, Vietnam China, Amerika, India dan Pakistan.

Tabel 5. Produksi Serealial, Neraca Perdagangan dan Tingkat Swasembada 1988/1990

	Produksi		Net Trade (1000 ton)	Swasembada %
	(1000 ton)	%		
Dunia	1 697 512	100	2 625	99
Negara Berkembang	847 407	49,92	-89 931	91
Asia Timur	418 658	24,66	-19 902	96
Asia Selatan	199 744	11,77	- 4 766	102
Indonesia	35 936	2,12	-1 765	95
Negara Maju	850 164	50,08	92 561	108

Sumber : FAO, 1995

Tabel 6. Produksi Beras 1989/1991

	(1000 ton)	(%)
Dunia	518 744	100
Negara Berkembang	493 787	95,2
Asia Timur	309 395	59,6
Asia Selatan	148 420	28,6
Indonesia	44 861	8,6
Negara Maju	24 957	4,8

Sumber : FAO, 1995

Dan Indonesia sejak 1998 telah kembali menjadi pengimpor beras terbesar dunia, terutama pada tahun 1998 dengan impor sebesar 6 juta ton lebih atau 21 % dari jumlah beras dipasar dunia (28 ton).

Pengalaman pada tahun 1998 dengan impor beras dalam jumlah besar dengan harga rendah belum tentu dapat terulang lagi kalau jumlah beras yang dipasarkan di pasar dunia tidak kebetulan meningkat tajam. Setelah tahun 1998 jumlah beras di pasar dunia menurun dari 28 juta ton menjadi 22 juta ton pada tahun 2000. Dengan demikian target tingkat swasembada beras di Indonesia perlu disesuaikan dengan ketersediaan beras di pasar dunia agar tidak terlalu mempengaruhi keseimbangan harga internasional. Suatu target tingkat swasembada akan terkait dengan usaha peningkatan produksi, tidak hanya dari segi teknologi budidaya, melainkan menyangkut kebijakan fiskal dan terkait dengan keadaan ekonomi keseluruhan serta perjanjian perdagangan dunia dalam WTO dan IMF. Hal ini dapat menyangkut tarif, subsidi harga input, kebijakan stabilisasi harga, pengembangan kelembagaan pendukung pertanian, serta program penelitian dan pengembangan teknologi.

KETERJANGKAUAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan, melainkan juga dapat terjangkau oleh semua rumah tangga, sehingga distribusi pangan yang ada mampu mencapai semua warga. Hal ini akan menyangkut keadaan ekonomi yang lebih luas yaitu tingkat harga, tingkat pendapatan, distribusi pendapatan, kemiskinan dan pengangguran. Dalam kualitas pangan menyangkut distribusi makanan yang mengandung protein dan lainnya seperti sayur dan buah.

Tabel 7. Pengeluaran per Kapita sebulan untuk Padi-padian dan Bahan Makanan Keseluruhan Tahun 1998

Golongan Pengeluaran (Rp 1000)	% Penduduk		Padian-padian (Rp)		Bahan makanan total	
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan
kurang dari 15	0,01	0,10	3638	4523	9952	9959
15 - 20	0,05	0,56	5780	5618	12785	13806
20 - 30	1,25	6,78	7809	8475	19283	19941
30 - 40	5,18	17,50	8858	10250	25018	26398
40 - 60	19,39	38,13	10004	12016	33882	35944
60 - 80	20,56	20,30	10942	13692	43957	48356
80 - 100	15,40	8,53	11415	15009	52921	60178
100 - 150	21,32	10,19	12132	16066	67061	75041
150 - 200	8,73	1,26	12610	17398	85447	96156
200 - 300	5,59	0,51	13470	18429	109180	119883
lebih dari 300	2,51	0,14	14425	19629	160432	149803
keseluruhan	100	100	11310	12380	57189	41384

Sumber : BPS, 1998

Tabel 8. Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Ikan, Daging, Susu dan Telur

Golongan Pengeluaran (Rp1000)	Ikan		Daging		Telur dan Susu	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
kurang 15	1153	590	0	107	49	149
15 - 20	762	921	197	173	377	266
20 - 30	1393	1464	375	326	689	518
30 - 40	1805	2053	789	623	1117	871
40 - 60	2930	3110	1566	1314	1807	1466
60 - 80	4092	4592	2674	2480	2863	2334
80 - 100	5107	6070	3792	3756	3865	3349
100 - 150	6286	7700	5580	5700	5660	4978
150 - 200	7368	9758	7839	8123	7859	7086
200 - 300	8679	12082	9784	11389	10177	9761
lebih 300	10537	14422	13971	13868	14570	12103
Keseluruhan	5041	3781	4255	1989	4428	1971

Sumber : BPS, 1998

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk pada tingkat pendapatan (dengan proksi pengeluaran) yang rendah mengkonsumsi dibawah rata-rata keseluruhan, baik didaerah pedesaan maupun perkotaan. Lebih-lebih untuk lapisan terbawah pengeluaran untuk bahan makanan kurang dari 25 % dari rata-rata. Apalagi kalau kita lihat konsumsi bahan makanan sumber protein yaitu ikan, daging, telur dan susu (tabel 8) distribusi dan keterjangkauannya sangat kurang memadai. Ikan merupakan sumber protein bagi penduduk termiskin, sedang daging nampak tidak terjangkau.

STABILITAS

Stabilitas produksi dengan trend naik dan stabilitas harga mempengaruhi ketahanan pangan dari dua segi, secara langsung pada konsumsi dan secara tidak langsung pada produksi jangka panjang. Stabilitas ini akan mengurangi ketidakpastian. Sumber *instability* dapat karena siklus bisnis, fluktuasi musiman, inflasi, iklim, hama dan penyakit tumbuhan, nilai tukar rupiah dan teknologi. Ketidakpastian dapat mempengaruhi efisiensi, menggeser supply ke kiri dan kesejahteraan menurun karena adanya perbedaan antara *expected production and utility* dengan *actual production and utility*, sehingga secara keseluruhan akan mengakibatkan *welfare loss*.

Di negara maju yang paling liberal pun campur tangan pemerintah dalam pasar hasil pertanian selalu ada agar dapat mengurangi ketidak-pastian dan *instability* dan sekaligus juga sebagai *support price policy*, seperti di Amerika Serikat pada gandum, susu dsb. Berbicara mengenai efisiensi ekonomi dan ekonomi kesejahteraan semua campur tangan pemerintah akan menghasilkan *net welfare loss* karena dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna yang secara murni tidak ada. Masalahnya pada negara maju justru harga hasil pertanian tertekan kebawah karena kemajuan teknologi, surplus produksi, permintaan inelastis, dan sifat hasil pertanian yang tidak tahan lama.

Kebijakan pemerintah pusat diperlukan untuk usaha stabilisasi dan mendukung harga, yang tidak mungkin dapat diatasi oleh koperasi maupun pemerintah daerah

otonom. Kebijakan stabilitas harga disamping fluktuasi musiman pada umumnya tiap negara juga berusaha melindungi keadaan ekonomi dalam negeri terhadap *instability* pasar internasional. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional tidak menjamin adanya stabilitas pasar yang dapat menguntungkan negara yang lemah. Lebih-lebih pasar beras yang bersifat oligopoli. Dengan demikian stabilitas ini cakupannya sangat luas, baik pada fluktuasi musiman, bencana alam, nilai tukar, tarif maupun ekonomi global yang penuh dengan kekuatan oligopolis dan kewenangan sumber dana internasional.

Sejak 1969/1970 Indonesia sudah melaksanakan kebijakan stabilisasi harga beras dengan kebijakan harga dasar (*floor price*) dan *ceiling price* dengan kombinasi dengan *buffer stock policy* dengan badan pelaksana BULOG disertai monopoli import beras. Banyak pakar telah meneliti dan menulis dan menyatakan bahwa kebijakan ini berhasil dengan baik dengan tetap memelihara mekanisme pasar bebas dalam negeri.

Dalam era reformasi campur tangan pemerintah yang terlalu besar tidak dapat diterima apalagi monopoli impor. Kebijakan nampak tidak jelas tujuannya dan masih mencari-cari. Kebijakan harga dasar masih berlaku tetapi tidak efektif karena liberalisasi import dan tanpa dukungan dana KLBI. Apakah memang kebijakan harga dasar sudah tidak diperlukan. Lalu bagaimana dengan kebijakan melindungi stabilitas terhadap berbagai hal yang mempengaruhi *instability*.

KEBIJAKAN PANGAN

Dari berbagai masalah ketahanan pangan tersebut ada berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut jangka pendek melainkan juga jangka panjang, yaitu bagaimana dapat menciptakan keadaan yang dapat mendorong produksi yang stabil dengan trend yang meningkat. Ketahanan pangan bukan hanya berurusan dengan ketersediaan melainkan juga keterjangkauan dan distribusi. Dalam hal ini baik jangka pendek (OPK) maupun jangka panjang (meningkatkan pemerataan dan mengurangi kemiskinan) harus direncanakan dalam pembangunan ekonomi keseluruhan. Distribusi yang meliputi seluruh pulau-pulau di wilayah Indonesia perlu diperhatikan dan stabilitas dalam arti luas sangat besar pengaruhnya, yaitu stabilitas politik dan keamanan.

Dengan kebijakan yang telah ditentukan untuk dapat memecahkan masalah tersebut diatas kita perlu memikirkan lembaga pelaksana yang dapat melaksanakan dengan efektif. Pengalaman yang berhasil dalam stabilisasi harga beras dari BULOG tidak selalu dapat dilaksanakan dengan cara yang sama dalam era reformasi dan liberalisasi, tetapi dengan potensi fasilitas dan pengalamannya dapat digunakan untuk tetap berfungsi sebagai alat stabilisasi dan distribusi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. OPM (Operasi Pasar Murni) mungkin sudah kurang penting lagi, tetapi OPK (Operasi Pasar Khusus) kepada kelompok sasaran masih diperlukan.

Stabilisasi jangka panjang untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap instabilitas dan ketidak pastian pasar internasional seharusnya merupakan tujuan jangka panjang kebijakan ketahanan pangan, sehingga tidak mudah berubah-ubah arah seperti kasus pada krisis ekonomi permulaan reformasi. Konsekuensi kebijakan ini menyangkut kebijakan tarif yang fleksibel, pengembangan teknologi melalui kebijakan yang mendukung penelitian pertanian. Tidak ada negara maju yang tidak mementingkan penelitian, agar tidak hanya sebagai konsumen hasil penelitian dari

negara lain. Disamping itu pengembangan infrastruktur pendukung pertanian secara local dan tersebar dapat dikembangkan melalui pemerintah daerah otonom.

KESIMPULAN

Ketahanan pangan di Indonesia dari ketersediaan pangan nampak sudah mencukupi baik dari kuantitas maupun kualitas. Namun dari segi keterjangkauan masih kurang memadai, untuk itu diperlukan kebijakan jangka pendek berupa OPK pada kelompok sasaran dan jangka panjang menyangkut kebijakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pemertaan dan mengurangi kemiskinan.

Dalam menghadapi ketidak pastian pasar beras dunia yang bersifat oligolistik Indonesia harus berupaya melindungi produksi beras dalam negeri agar ketahanan pangan jangka panjang dapat dicapai. Proteksi sampai batas tertentu tanpa mengabaikan ketentuan WTO diperlukan dalam menentukan tarif yang fleksibel. Kebijakan yang dapat mendorong penelitian pertanian untuk menghasilkan teknologi baru seharusnya selalu dilakukan. Pengembangan infra struktur kelembagaan pendukung pertanian dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah.

Badan pelaksana distribusi pangan dan stok yang diperlukan tidak harus membentuk badan baru, dengan catatan bahwa badan yang ada (BULOG) dapat beroperasi secara efisien, *accountable* dan transparan, serta mempunyai tata pengelolaan yang baik (*good governance*).

PUSTAKA

BPS,1998. *Statistik Indonesia*

FAO,1995. *World Agriculture : Toward 2010*. John Wiley &Sens

Masyhuri, 2001. Kebijakan Pangan Nasional dalam Kerangka Otonomi Daerah. Round Table Ketahanan Pangan Nasional dalam Kerangka Otonomi Daerah, MMA UGM Yogyakarta 31 Maret 2001

Sawit, M.H., 2001. Perdagangan Beras Dunia dan Perubahan Kebijakan Beras Negara-Negara Eksportir dan Indonesia. Round Table Ketahanan Pangan Nasional dalam Kerangka Otonomi Daerah. MMA UGM. Yogyakarta 31 Maret 2001

Soetrisno, L. & D. Ismoyowati, 1999. Jaring Pengaman Sosial dan Masyarakat Pedesaan. dalam S. Widodo & Suyitno (eds), *Pemberdayaan Pertanian Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Aditya Media, Yogyakarta : 83-93

Widodo, S. , 1992. Swasembada Beras, Prospek dari Masalahnya *Agri Ekonomi*. Juli 1992 : 64-74